



PUSAT STUDI PENDIDIKAN
DAN KEBIJAKAN



Kilas
Pendidikan



Peminat Turun: Mengapa SD Negeri Harus Revitalisasi?

Sekolah Dasar (SD) Negeri yang sepi peminat semakin menjadi sorotan media pada awal tahun ajaran 2026/2027 ini. Jumlah pendaftar peserta didik baru jauh lebih rendah dari kapasitas daya tampung yang tersedia di satuan SD Negeri di berbagai kota. Fenomena ini perlu direspon pemerintah pusat sebagai penentu kebijakan nasional maupun pemerintah daerah sebagai pengelola pendidikan pendidikan dasar dan menengah. Sebagai contoh, salah satu SDN 1 Gedung Meneng di Bandar Lampung hanya diikuti oleh 2 (dua) murid¹, sementara di Kota Semarang SDN Purwoyoso 01 hanya menampung 3 (tiga) siswa baru². Di Banjarmasin, fenomena ini sudah terdeteksi sejak 2025, dimana pada tahun tersebut, tercatat ada 117 SD Negeri mengalami kekurangan siswa dan berlanjut di tahun 2026 di SDN Teluk Dalam 10 Banjarmasin yang hanya memperoleh 1 peserta didik baru³.

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai arah kebijakan pendidikan dasar kedepannya: Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah untuk merespon situasi ini? Artikel ini berusaha untuk menjawab pertanyaan tersebut dengan merujuk pada data serta berbasis pada pengalaman PSPK melakukan kajian dengan isu serupa⁴. Dalam artikel ini PSPK juga berpendapat bahwa SD Negeri perlu "diramalkan" kembali alih-alih pemerintah membiarkan mekanisme pasar bebas diterapkan yang artinya SD Negeri yang tidak banyak diminati dibiarkan gulung tikar.

¹ Liputan6 (2026). "SD Negeri Sepi Peminat, DPR Minta Pemerintah Berbenah"

<https://berita.liputan6.com/politik/read/8248418/sd-negeri-sepi-peminat-dpr-minta-pemerintah-berbenah>

² CNN Indonesia (2026). "Minim Murid SD Negeri di Kota Semarang, Apa Sebabnya?"

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260716081654-20-1381303/minim-murid-sd-negeri-di-kota-semarang-apa-sebabnya>

³ RRI Banjarmasin (2026). "Sepi Peminat, Sejumlah SD Negeri di Banjarmasin Kembali Kekurangan Siswa"

<https://rri.co.id/banjarmasin/regional/2545452/sepi-peminat-sejumlah-sd-negeri-di-banjarmasin-kembali-kekurangan-siswa>

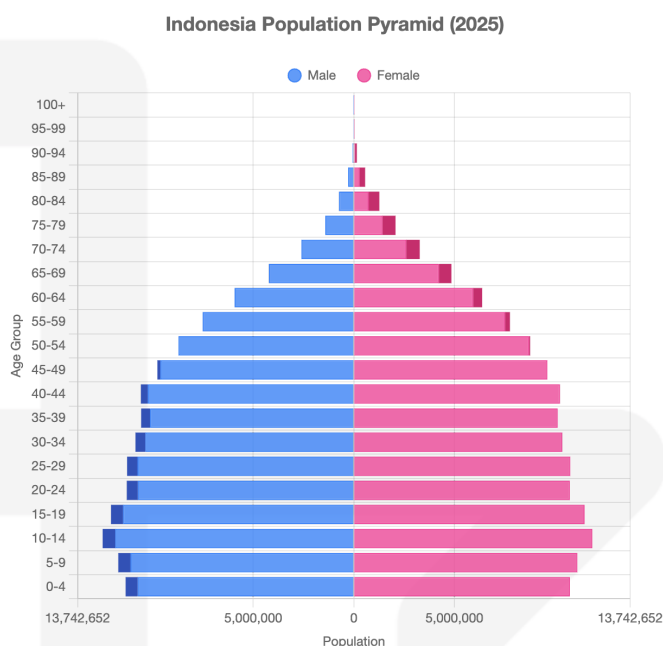
⁴ PSPK telah mengerjakan kajian terkait daya tampung sekolah dan PPDB bersama PSKP pada link berikut:

https://pspk.id/wp-content/uploads/2026/02/Stephen-Pratama-et-al.-2024.-Tipologi-Akses-Pendidikan-Kondisi-dan-Penyediaan-Daya-Tampung-SMP_MTs-di-Indonesia_compressed-1.pdf

Kajian ini menjadi dasar untuk memahami variasi akses pendidikan dan merumuskan kebijakan pendidikan yang asimetris sesuai dengan kondisi lokal masing-masing daerah.

Tren Populasi Usia SD

Turunnya peminat SD Negeri ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Namun sebelum membandingkan antara peminat SD Negeri dengan SD Swasta, penting untuk disadari juga bahwa populasi penduduk usia SD pun mengalami penurunan. Struktur piramida penduduk Indonesia menunjukkan pola demografis yang signifikan. Kenyataan ini perlu menjadi satu pertimbangan penting dalam menentukan suplai satuan pendidikan dasar di Indonesia.

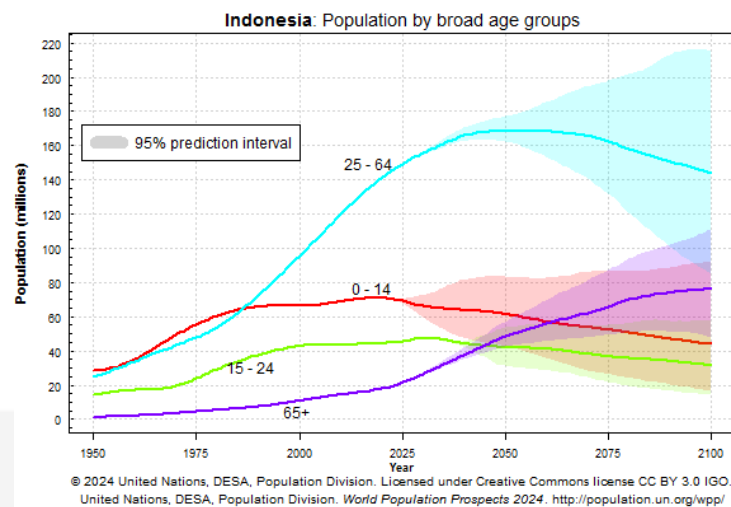


Gambar 1: Piramida Penduduk Indonesia

Sumber: Population Pyramids. (2025). Indonesia Population Pyramid and Demographic Analysis. Retrieved from <https://populationpyramids.com/indonesia>

Gambar 1 di atas menunjukkan bahwa anak usia Sekolah Dasar (SD), yang secara umum berada di rentang 7 hingga 12 tahun, kini jumlahnya tidak lagi mendominasi seperti generasi di atasnya. Penyempitan di bagian bawah piramida ini menjadi gambaran bahwa angka kelahiran di Indonesia terus menurun. Meskipun saat ini beberapa ruang kelas SD masih dipenuhi oleh angkatan usia 10-14 tahun, dalam beberapa tahun ke depan sekolah-sekolah akan mulai merasakan penurunan jumlah murid baru yang signifikan.

Hal ini juga diperkuat oleh data dari United Nation sendiri melalui *Department of Economic and Social Affairs Population Division* yang memproyeksikan bahwa populasi usia SD di Indonesia akan terus mengalami tren penurunan (**Gambar 2**). Dengan penurunan populasi usia SD yang berkelanjutan, sangat dimungkinkan terjadi surplus daya tampung sekolah dasar secara keseluruhan di Indonesia.



Gambar 2: Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kategori Usia di Indonesia
Sumber: [United Nation, Department of Economic and Social Affairs Population Division](http://population.un.org/wpp/)

Hasil analisis daya tampung yang dilakukan PSPK tahun 2025 juga menunjukkan bahwa SD Negeri di 88 persen kabupaten/kota di seluruh Indonesia sudah cukup untuk menampung seluruh anak usia SD. **Gambar 3**, menunjukkan sebaran geografis dari berbagai kondisi ketersediaan daya tampung di tingkat kabupaten dan kota. Mayoritas wilayah Indonesia, ditunjukkan dengan warna biru gelap, telah mencapai kondisi di mana SD Negeri mampu menyediakan daya tampung yang mencukupi untuk seluruh peserta didik usia sekolah dasar. Dengan kata lain jika SD Negeri saja sudah dapat menampung keseluruhan peserta didik usia SD, maka keberadaan SD swasta di mayoritas wilayah Indonesia justru menyebabkan surplus layanan pendidikan dasar (sekolah dasar). Hal ini tentu saja menjadi kondisi yang penting untuk dipahami dalam konteks fenomena sepiunya peminat SD Negeri.



Gambar 3: Peta Daya Tampung SD Tahun 2025
Sumber: Dapomart, diolah

Faktor Pertimbangan Orang Tua Untuk Memilih SD swasta

Pertanyaan berikutnya adalah ketika daya tampung SD Negeri dan swasta berlebih, mengapa SD swasta lebih dipilih masyarakat sampai-sampai peminat SD Negeri menurun drastis?

Pertama, sebagian orang tua lebih memilih SD swasta karena kedekatan dengan tempat tinggal. Namun faktor ini tidak satu-satunya penentu. Pertumbuhan minat terhadap sekolah swasta cenderung terkonsentrasi di wilayah urban yang didukung oleh kemudahan akses transportasi serta tingginya variasi model pembelajaran di sekolah swasta. Namun secara agregat nasional, sekolah negeri tetap mendominasi porsi peserta didik di Indonesia⁵.

Kedua, sebagian orang tua memiliki keleluasaan untuk menentukan pilihan tanpa peduli jarak. Mereka menggunakan berbagai pertimbangan lain seperti pelajaran agama yang menjadi prioritas di beberapa SD swasta, misalnya. Sedangkan di SD Negeri, mengacu pada kerangka kurikulum nasional, mata pelajaran agama diajarkan sekitar 2 jam per minggu yang artinya murid hanya mempelajari muatan mata pelajaran agamanya sekitar 120 menit setiap minggunya. Sementara di sekolah swasta berbasis agama, mata pelajaran agama secara keseluruhan bisa mencapai empat kali lipat lebih banyak. Pertimbangan kekayaan mata pelajaran yang diajarkan tidak hanya mapel agama. Ada juga orang tua yang ingin anak mereka belajar bahasa asing sedini mungkin, maka ketika Bahasa Inggris belum menjadi mata pelajaran wajib di SD, sebagian SD Negeri tidak mengajarkannya sehingga sekolah swasta menjadi lebih menarik bagi sebagian orang tua. Selain program kurikuler, SD swasta juga secara proaktif mempromosikan kegiatan ekstrakurikuler yang beragam, yang dapat memperkaya pembelajaran. Hal ini menjadi daya tarik SD swasta yang lagi-lagi sulit ditandingi SD Negeri.

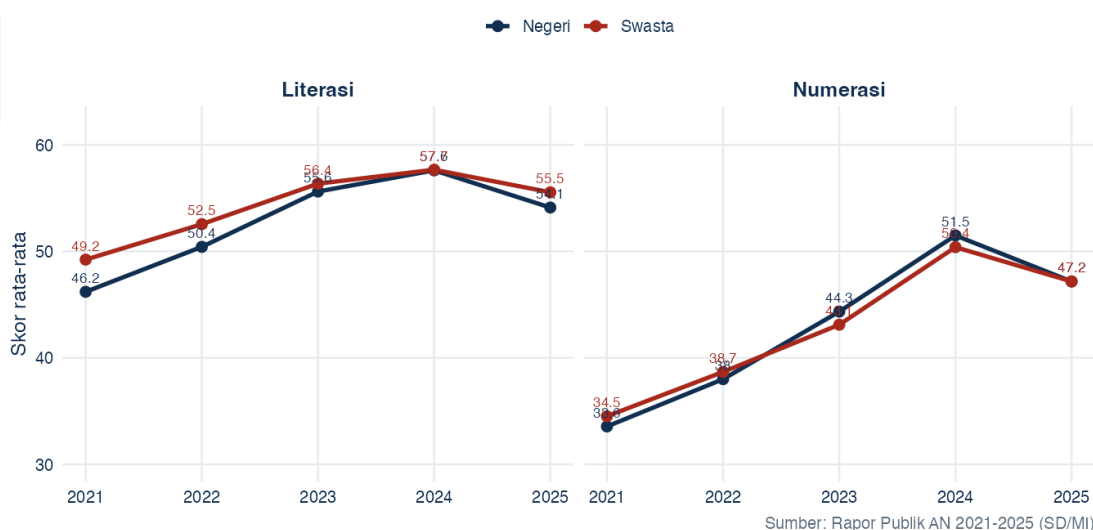
Ketiga, fasilitas juga menjadi pertimbangan orang tua. Kondisi lingkungan bermain, perpustakaan, atau bahkan laboratorium juga menjadi daya tarik SD swasta. Namun demikian, faktor yang juga menjadi alasan orang tua memilih SD swasta adalah kedekatan latar belakang sosial ekonomi dan budaya keluarga. Orang tua menginginkan anak-anaknya bergaul dengan anak-anak lain yang berasal dari latar belakang keluarga (status sosial ekonomi, agama, dsb.) yang relatif serupa.

⁵ CNBC Indonesia Research. (2026, 4 Januari). Sekolah negeri ditinggalkan? Orang tua diam-diam beralih ke swasta. CNBC Indonesia.
<https://www.cnbcindonesia.com/research/20260104121217-128-699469/sekolah-negeri-ditinggalkan-orang-tua-diam-diam-beralih-ke-swasta>

Capaian Hasil Belajar SD Negeri dan SD swasta

Jika capaian literasi menjadi salah satu pertimbangan orang tua dalam menilai kualitas SD, apakah SD swasta secara empiris selalu lebih unggul dibandingkan SD Negeri? Analisis hasil Asesmen Nasional (AN)⁶ tidak menunjukkan demikian.

Hasil asesmen literasi dan numerasi dalam AN menunjukkan bahwa kualitas capaian SD Negeri dan swasta hampir sama. Kedua kelompok tersebut memiliki pola dan skor rata-rata yang hampir serupa sepanjang tahun 2021 hingga 2025 (**Gambar 4**).



Gambar 4. Tren Skor Literasi & Numerasi SD/MI Negeri dan Swasta

Sumber: Rapor Publik Asesmen Nasional 2021-2025. Diolah oleh PSPK.

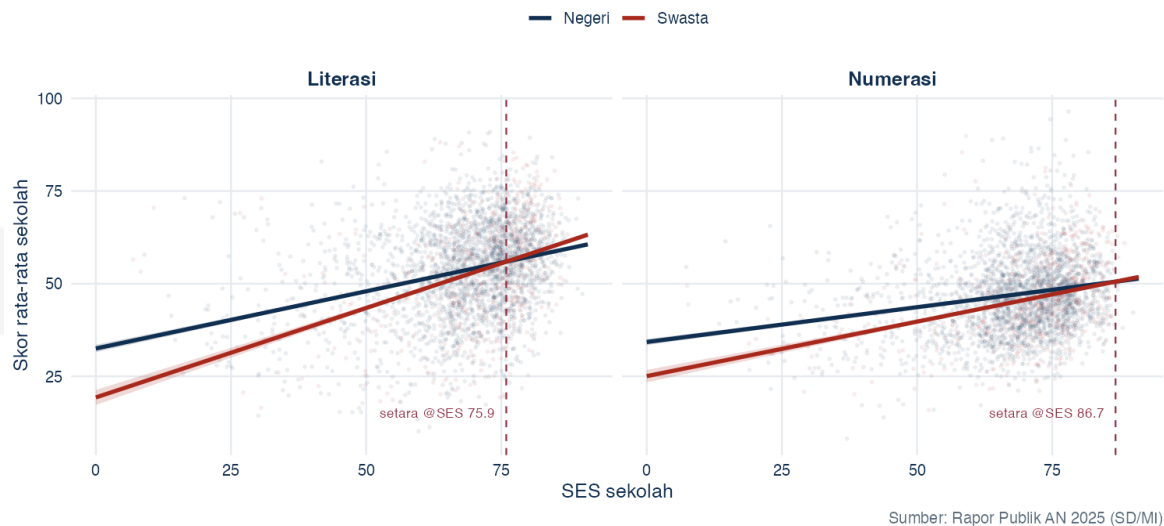
Hasil skor rata-rata literasi menunjukkan SD Negeri sedikit tertinggal pada 2021-2023 dan relatif sama di tahun 2024. Namun, pada AN tahun 2025, rata-rata skor literasi murid SD/MI swasta (55.5) lebih tinggi dibandingkan SD/MI Negeri (54.1), sementara rata-rata skor numerasi untuk keduanya sama, yaitu 47.2. Dengan kata lain, secara keseluruhan sepanjang lima tahun kualitas SD Negeri dan swasta berada di level yang sama.

Rata-rata skor literasi dan numerasi pada **Gambar 4** memberikan gambaran umum yang berharga, namun perlu untuk mencermati perbandingan skor literasi dan numerasi yang lebih mendalam. Untuk menjawabnya secara adil, dibutuhkan perbandingan yang berimbang, yakni dengan memperhitungkan faktor kelompok status sosial ekonomi (*socioeconomic status* atau SES⁷) terhadap capaian

⁶ Asesmen Nasional (AN) adalah program evaluasi tahunan pemerintah untuk memetakan kualitas seluruh satuan pendidikan (sekolah, madrasah, dan program kesetaraan) melalui tiga instrumen utama: AKM (Literasi-Numerasi), Survei Karakter, dan Survei Lingkungan Belajar.

⁷ Indeks sosial ekonomi status sekolah berdasarkan agregasi IASP dan Asesmen Nasional (sumber: codebook rapor pendidikan AN 2025)

pembelajaran. Komposisi murid di kedua jenis sekolah ini seringkali berbeda, mengingat sebagian SD swasta menyaring murid melalui biaya yang perlu disediakan orang tua. Oleh karena itu, analisis yang mengendalikan faktor SES dapat membantu memisahkan pengaruh latar belakang keluarga dari efektivitas pembelajaran di sekolah.



Gambar 5. Hubungan SES Sekolah dengan Skor Literasi dan Numerasi SD/MI Negeri dan Swasta, AN 2025

Sumber: Rapor Publik Asesmen Nasional 2025. Diolah oleh PSPK.

Ketika membandingkan kualitas hasil asesmen literasi antara SD Negeri dengan SD swasta yang melayani anak-anak dari kelompok SES yang sama (**Gambar 5**), ada dua hal yang perlu kita perhatikan dengan hati-hati.

Pertama, SD swasta menunjukkan capaian literasi yang lebih tinggi **hanya** pada sekolah dengan SES tertinggi, yakni 16% Sekolah Dasar di Indonesia dengan indeks SES teratas, atau anak-anak dari kelompok yang paling sejahtera di Indonesia,. Sementara SD swasta yang diakses anak-anak dari kelompok SES yang lebih rendah, kualitas hasil belajarnya tidak lebih baik daripada teman-temannya dari kelompok SES setara yang bersekolah di SD Negeri. Bahkan untuk anak-anak dari kelompok miskin yang bersekolah di SD swasta berbiaya rendah (*low-fee private schools*), capaian literasi mereka di bawah teman-teman yang juga dari kelompok miskin namun bersekolah di SD Negeri.

Ini artinya asumsi orang tua bahwa SD swasta lebih bagus kualitasnya daripada SD Negeri tidak sepenuhnya terbukti. Hanya pada kalangan masyarakat yang lebih sejahtera lah SD swasta menjadi opsi yang lebih baik bagi para orang tua untuk mengembangkan kemampuan literasi yang fundamental untuk anak mereka.

Temuan di atas berkaitan dengan poin kedua yang perlu dicermati, yaitu "curam"-nya kesenjangan hasil asesmen literasi antara anak-anak miskin di SD swasta dengan

anak-anak dari keluarga sangat sejahtera yang juga bersekolah di SD swasta. Pola ini menunjukkan bahwa keunggulan yang selama ini dilekatkan pada SD swasta sebagian besar bukan hanya berasal dari mutu layanan sekolahnya, melainkan dari komposisi dan latar belakang murid yang dilayaninya.

Revitalisasi SD Negeri Demi Sistem Pendidikan yang Berkeadilan

Analisis tersebut menguatkan pandangan bahwa mekanisme persaingan pasar yang diterapkan di kalangan sekolah swasta mendorong kesenjangan kesempatan pendidikan antar SES. Pendidikan yang diselenggarakan oleh Negara, yaitu sekolah negeri, pada hakikatnya dibuat untuk memperkecil kesenjangan berbasis SES dengan menyediakan pendidikan dasar bermutu untuk semua anak secara gratis.

Memandang peran sekolah negeri untuk pendidikan yang berkeadilan sosial tersebut, PSPK mendorong revitalisasi SD Negeri. Pemerintah selaku pemilik dan pengelola SD Negeri perlu merespon kebutuhan dan harapan orang tua, juga relevan dengan perkembangan zaman.

PSPK merekomendasikan dua strategi utama untuk revitalisasi SD Negeri. Kedua rekomendasi ini harus berlandaskan data dan membutuhkan komitmen pemerintah pusat dan daerah. Strategi pertama berkaitan dengan penguatan program dan layanan dan strategi kedua berkaitan dengan pengelolaan SD Negeri yang populasi muridnya berkurang drastis.

Rekomendasi 1: Revitalisasi dengan dukungan pemerintah

Pembiayaan SD Negeri sangat bergantung pada dana alokasi umum untuk guru dan tenaga kependidikan, serta dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) untuk operasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 8 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan. Dana BOS diatur berdasarkan jumlah murid sehingga berkurangnya peminat suatu SD Negeri menyebabkan turunnya dana operasional yang dimiliki sekolah tersebut. Akibatnya satuan SD Negeri tadi akan kesulitan untuk meningkatkan daya saing mereka.

PSPK mengusulkan adanya **program yang dikelola di tingkat daerah untuk mendukung revitalisasi SD Negeri** agar dapat menyediakan program pembelajaran yang lebih berkualitas dan relevan. Misalnya, dengan merujuk pada ekspektasi orang tua murid juga pada kerangka kurikulum nasional, SD Negeri perlu didukung sumber daya dari pemerintah untuk dapat menyelenggarakan pembelajaran bahasa Inggris⁸. Selain itu program ini juga perlu mendukung satuan SD Negeri menambah pilihan kegiatan ekstrakurikuler, penguatan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman, serta

⁸ Ulumudin, I., Relisa, Rahmadi, U. T., Hidayati, S., Setiyawan, D., Aisha, A., Fujianita, S., Murdiyaningrum, Y., Waruwu, H., Lisnawati, Abdullah, P., Helga, M., Ramadhan, R. A., Purba, R., Maulana, T., Matakupan, S., Chodidjah, I., Pratama, S., Mayangwuri, S., Waluyo, Sisdiana, E., Nurlistiawati. (2024). Menavigasi Tantangan Pembelajaran Bahasa Inggris di Sekolah Menuju Literasi Global. Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan (PSKP).

penguatan kompetensi guru untuk mendukung pembelajaran yang inklusif di satuan SD Negeri. Upaya peningkatan kualitas SD Negeri tersebut tidak seharusnya menjadi beban satuan pendidikan semata tetapi dikelola oleh pemerintah yang dilengkapi dengan peningkatan kapasitas guru-gurunya.

Rekomendasi 2: Sekolah Satu Atap

Merespon kondisi satuan-satuan SD Negeri yang semakin sedikit jumlah muridnya dan kemungkinan hal ini akan terus terjadi di masa depan, PSPK merekomendasikan **pengembangan model sekolah satu atap**, yaitu TK dan SD berada di lingkungan yang sama. Berbasis pada cita-cita sistem pendidikan Indonesia untuk mencanangkan Wajib Belajar 13 tahun, maka pemerintah perlu memperluas akses program 1 tahun pra-SD (jenjang Taman Kanak-kanak) sebagaimana telah dicanangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 (**Gambar 6**). Data Dapodik (2025) menunjukkan bahwa TK yang diselenggarakan oleh Negara (TK Negeri) saat ini hanya kurang dari 4 persen. Oleh karena itu, TK-SD Satu Atap tidak saja berpotensi untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan lingkungan satuan pendidikan dikarenakan kurangnya murid SD Negeri, tetapi kebijakan ini juga dapat menjadi bentuk komitmen pemerintah untuk mencapai Wajib Belajar 13 Tahun⁹.



Gambar 6. Landasan pelaksanaan TK-SD Satu Atap

Pengembangan strategi revitalisasi SD Negeri dan TK-SD Negeri satu atap di atas perlu ditentukan di tingkat daerah **berbasis pada data** yang menunjukkan akar masalah maupun sumber daya yang dimiliki di daerah tersebut. Data sebaran layanan TK dan SD Negeri serta karakteristik wilayah, perlu menjadi dasar untuk menentukan apakah dibutuhkan TK Negeri di area tersebut¹⁰, misalnya apakah area tersebut merupakan area perumahan ataupun area bisnis/industri yang tidak sesuai untuk lokasi pendirian TK. Dengan kata lain, pemerintah daerah perlu berinisiatif untuk melakukan kajian untuk memastikan layanan pendidikan dasar yang menjadi fondasi Wajib Belajar 13 Tahun tersedia dan terjangkau secara jarak dan biaya oleh setiap dan semua anak Indonesia.

⁹ Pemerintah saat ini telah menyediakan Panduan Penyelenggaraan PAUD-SD Satu Atap yang dapat diunduh pada link berikut:

<https://paudpedia.kemendikdasmen.go.id/buku-saku-panduan/wajib-belajar-prasekolah/penyelenggaraan-paud-sd-satu-atap-untuk-percepatan-wajar-pendidikan-prasekolah?ref=ABCPWB3XYZ&ix=PWBSEI999>

¹⁰ Salah satu data yang dapat diacu adalah profiling PAUD Nasional dapat diakses melalui:

<https://paudpedia.kemendikdasmen.go.id/wajar1tahunpendidikanprasekolah/profiling-paud>

Atribusi:

Felicia, N., Rahmani, F. N., Hendryanto, Y. D., & Wiradika, I. (2026). *Peminat turun: Mengapa SD negeri harus revitalisasi?* Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan.

Penafian:

Kilas Pendidikan ini murni merefleksikan pandangan peneliti Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK) berdasarkan hasil studi literatur dan keterlibatan langsung PSPK dalam mengulas berbagai tantangan kebijakan SNP serta merekomendasikan solusi yang relevan. Kilas Pendidikan ini dapat dikutip, disebarluaskan, dan digunakan untuk tujuan nonkomersial.

Tentang PSPK:

Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK) merupakan yayasan non-profit independen yang berfokus pada penguatan kebijakan pembelajaran yang berpihak kepada anak. PSPK berpijak pada data ilmiah, serta menyebarkan praktik baik di lapangan dalam ekosistem pendidikan Indonesia.

**Penulis:**

Nisa Felicia
Fathiyya Nur Rahmani
Yeremia Dwi Hendryanto
Indhi Wiradika

Desainer:

M. Nadhif A.